



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RDPU PANJA PENINGKATAN LITERASI DAN TENAGA PERPUSTAKAAN
KOMISI X DPR RI
(BIDANG: PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI - PEMUDA DAN
OLAHRAGA - PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DAN PERPUSTAKAAN
NASIONAL)**

Tahun Sidang	: 2022 – 2023.
Masa Sidang ke-	: V (Lima)
Sifat Rapat	: Terbuka
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU)
Dengan	: Program Studi Perpustakaan di Perguruan Tinggi: Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Yarsi, dan Ibu Pangesti Wiedarti, M.Appl.Ling., Ph.D (Kepala SATGAS Penyusunan Peta Jalan Penguatan Literasi/Dosen UNY/Kemenko PMK)
Hari/Tanggal	: 20 Juni 2023
Pukul	: 14.00 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Pimpinan Rapat	: Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM
Sekretaris Rapat	: Dadang Prayitna, S.IP., M.H./Kabagset. Komisi X DPR RI
Agenda acara	: <ol style="list-style-type: none">1. Peluang dan Tantangan Literasi dan Tenaga Perpustakaan di Indonesia.2. Dukungan Perguruan Tinggi Terhadap Peningkatan Literasi.3. Peta Kebutuhan dan Daya Serap Lulusan Prodi Ilmu Perpustakaan.4. Masukan dan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Literasi dan tenaga Perpustakaan.
Hadir Komisi X DPR RI	: 16 orang dari 31 orang Anggota Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI.
Hadir Narasumber	: <ol style="list-style-type: none">1. Margareta Aulia Rachman (Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan, Universitas Indonesia)2. Dr. Fuad Gani, SS, M.A (Dosen Ilmu Perpustakaan FIB Universitas Indonesia)3. Dr. Dra. Indira Irawati, M.A (Dosen Ilmu Perpustakaan FIB Universitas Indonesia)

4. **Dr. Ute Lies Siti Khadijah, M.Si (Ketua Program Studi Perpustakaan dan Sains Informasi Fikom Universitas Padjajaran)**
5. Asep Saeful Rohman, S.Sos. M.I.Kom (Dosen Universitas Padjajaran)
6. Andri Yanto S.Sos, M.I.Kom (Dosen Universitas Padjajaran)
7. Elnovani (Dosen Universitas Padjajaran)
8. **Heriyanto, P.hD (Ketua Program Studi Ilmu Perpustakaan FIB Universitas Diponegoro)**
9. **Dr. Umami Azizah Rachmawati, S.Kom, M.Kom (Kepala Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi)**
10. Indah Kurnianingsih, S.IP. M.P (Dosen Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi)
11. Nita Ismayati, SS, M.Hum (Dosen Prodi Perpustakaan dan Sains Informasi Universitas Yarsi).
12. **Pangesti Wiedarti, M.Appl.Ling.,PhD. (Kepala Satgas Penyusunan Peta Jalan Penguatan Literasi Kemenko PMK (Dosen Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya, Universitas Negeri Yogyakarta)**
13. Molly Prabawati (Asisten Deputi Literasi, Inovasi, dan Kreativitas Kemenko PMK)
14. Tri Haryanto (Koordinator Literasi Kemenko PMK)
15. Ferdiansyah (Koordinator Literasi Kemenko PMK)

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI dibuka pada pukul 14.15 WIB oleh **Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM.**, setelah kuorum tercapai sebagaimana ditentukan dalam pasal 281 ayat (1) dan pasal 276 ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum. Rapat diawali dengan pengantar Ketua Rapat, dilanjutkan pemaparan narasumber dari Program Studi Perpustakaan di Perguruan Tinggi: Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Yarsi, dan Ibu Pangesti Wiedarti, M.Appl.Ling., Ph.D (Kepala SATGAS Penyusunan Peta Jalan Penguatan Literasi/Dosen UNY/Kemenko PMK), dan menampung pertanyaan dan saran dari Anggota Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI.

II. KEPUTUSAN/KESIMPULAN

- A. Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Program Studi Perpustakaan di Perguruan Tinggi: Universitas Indonesia, Universitas Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas Yarsi, dan Ibu Pangesti Wiedarti, M.Appl.Ling., Ph.D (Kepala SATGAS Penyusunan Peta Jalan Penguatan Literasi/Dosen UNY/

/Kemenko PMK) yang menyampaikan beberapa poin utama, masukan dan rekomendasi antara lain: (bahan terlampir)

Program Studi Perpustakaan Universitas Indonesia:

1. Peningkatan kompetensi lulusan (Pustakawan) melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian yang berkaitan dengan ilmu perpustakaan dan informasi;
2. Komitmen, keberpihakan dan kolaborasi pemangku kepentingan pada peningkatan literasi di berbagai bidang melalui penelitian dan pengabdian masyarakat;
3. Kebijakan/program berskala nasional pada kegiatan literasi informasi dan literasi digital di perguruan tinggi dalam rangka meningkatkan kompetensi literasi generasi Z;
4. *Grand Desain* Literasi Nasional - kebijakan dibuat secara terstruktur;
5. Peningkatan kompetensi lulusan Program Studi Ilmu Perpustakaan (adaptasi pada Teknologi Informasi dan pemikiran kritis);
6. Penelitian dan pengabdian masyarakat berkaitan dengan peningkatan literasi (misal pada isu mis-informasi, dis-Informasi, mal-informasi, hoaks);
7. Peningkatan kolaborasi antar lembaga terutama lembaga informasi;
8. Pengadaan pustakawan pada satuan pendidikan tingkat sekolah;
9. Pembukaan S3 Kajian Informasi di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Program Studi Perpustakaan Universitas Padjajaran:

1. Pemerintah sebagai penanggung jawab urusan literasi dan perpustakaan kiranya dapat mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan/regulasi yang ada dalam rangka peningkatan literasi dan sumber daya tenaga perpustakaan, khususnya pustakawan. Termasuk mensinergikan berbagai regulasi terkait literasi informasi seperti pada UU OJK, UU Kesehatan, dan UU Pemajuan Kebudayaan;
2. Pemerintah (Presiden dan DPR) perlu mempertimbangkan suatu revisi kebijakan, baik dalam sektor perpustakaan, pendidikan, maupun sektor lainnya yang berkepentingan dengan peningkatan literasi masyarakat, karena dalam regulasi-regulasi yang ada tidak disebutkan atau belum diatur secara langsung tentang literasi serta upaya peningkatannya;
3. Dalam UU 43/2007 terkait ketenagaan perpustakaan kiranya dapat disesuaikan dengan regulasi teknis yang berlaku saat ini, yang mengatur tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan. Mengingat profesi ini memiliki tugas, fungsi, dan peran yang strategis dalam peningkatan literasi masyarakat, selain profesi guru dan dosen (pendidik). Perlu suatu Revisi terhadap UU 43/2007 tentang Perpustakaan;
4. Dalam Permendiknas 25/2008 kiranya dapat direvisi terkait standar (kualifikasi) tenaga perpustakaan sekolah. Perlu penyesuaian dengan Permendikbud 6/2019 terkait diakuinya nomenklatur Fungsional Pustakawan di Sekolah;

5. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus berkomitmen untuk secara bertahap menyerap sarjana ilmu perpustakaan dan informasi, maupun lulusan pendidikan vokasi perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan tenaga profesional pengelola perpustakaan, sesuai dengan standar nasional agar perpustakaan dapat berfungsi sebagaimana mestinya dan berkontribusi nyata pada peningkatan literasi masyarakat.

Program Studi Perpustakaan Universitas Diponegoro:

1. Literasi merupakan sebuah proses belajar. Maka institusi pendidikan lebih memberikan kesempatan kepada peserta didik mengalami berbagai macam sumber informasi dalam proses belajarnya;
2. Perpustakaan dikelola oleh pustakawan, yaitu seseorang yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan perpustakaan dan informasi;
3. Perpustakaan perlu didukung untuk berinovasi dan menjadi tempat kerja yang menantang dari segi keilmuan dan dunia praktis;
4. Program Studi Ilmu Perpustakaan harus memiliki salah satu visi menjadikan lulusannya memiliki kompetensi seorang pendidik;
5. Perlu untuk membuka formasi pustakawan dari lulusan program studi perpustakaan dari Perguruan Tinggi.

Program Studi Perpustakaan Universitas Yarsi:

1. Pembukaan rekrutmen tenaga perpustakaan sekolah untuk dikuliahkan di program studi Perpustakaan dan Sains Informasi dengan program beasiswa;
2. Penerimaan tenaga perpustakaan sekolah berpendidikan SMA yang sudah bekerja di perpustakaan (36,34 %) dengan sistem penerimaan perguruan tinggi berbasis RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) yang menyetarakan ketrampilan yang sudah mereka miliki sehingga mahasiswa yang ketrampilannya dapat dikonversi, masa studinya bisa kurang dari 4 tahun;
3. Penguatan literasi intinya ada pada Kompetensi Pustakawan dan kompetensi pustakawan itu yang utama diperoleh dari sekolah formal Ilmu Perpustakaan dalam hal ini prodi-prodi di perguruan tinggi penyelenggara Prodi Perpustakaan dan Sains informasi;
4. Program intervensi pembudayaan membaca yang tepat, mudah dilaksanakan, dilakukan secara sistemik, komprehensif, merata ke semua komponen di masyarakat, berkelanjutan, dan dikelola secara profesional oleh lembaga yang mampu menanganinya;
5. Pengembangan budaya kegemaran membaca;
6. pengembangan perbukuan dan penguatan konten literasi;
7. peningkatan kualitas layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial;
8. Pembukaan formasi ASN atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) utk tenaga perpustakaan sekolah/madrasah;
10. Revisi Permendiknas No.25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah;
11. Revisi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Tanggal 1 Desember 2010;

12. Pengadaan Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan Sekolah untuk tenaga perpustakaan sekolah yang sudah bekerja dengan menggandeng Prodi-prodi Perpustakaan sebagai salah satu wujud pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.

**Kepala Satgas Penyusunan Peta Jalan Penguatan Literasi/Dosen UNY/
Kemenko PMK:**

1. Meningkatkan indikator Budaya Literasi yang utamanya ditujukan untuk meningkatkan kecakapan dan karakter masyarakat serta mendukung peningkatan posisi kabupaten/kota dalam berbagai indikator nasional (AKSI, Indeks Ali Baca, Tingkat Kegemaran Membaca, IPLM);
 2. Penyusunan *Roadmap* Peningkatan Budaya Literasi sebagai panduan dan arah serta wadah kolaborasi dan sinergi peran seluruh pemangku kepentingan dalam peningkatan budaya literasi;
 3. Sinergi lintas K/L dalam meningkatkan literasi masyarakat melalui bidang intervensi 1) Peningkatan Akses, Kualitas Pelayanan, dan SDM Literasi; 2) Peningkatan Ketersediaan Konten Literasi; dan 3) Peningkatan Budaya Gemar Membaca dan Menulis/Berkarya; 4) Beasiswa LPDP untuk menunjang Peningkatan Literasi (Pustakawan).
- B. Terhadap penjelasan dan masukan yang disampaikan narasumber, Panja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI berpandangan diantaranya sebagai berikut:
1. Mendorong koordinasi, sinergi dan kolaborasi Pemerintah (antar Kementerian/Lembaga), Lembaga Pendidikan, Industri, dan Masyarakat agar ada keberpihakan terhadap kebijakan program literasi dan tenaga pustakawan;
 2. Perlunya penguatan karakter dan perlu adanya metode penilaian yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia;
 3. Mendorong perlu adanya RUU Literasi;
 4. Mendorong Pemerintah untuk menjadikan program literasi sebagai program prioritas;
 5. Mendorong penambahan anggaran Perpustakaan RI untuk mengimplementasikan program peningkatan literasi dan tenaga perpustakaan serta perpustakaan sekolah;
 6. Mendorong perhatian serius Pemerintah terhadap kesejahteraan pustakawan diantaranya dengan penyediaan formasi PPPK, jenjang karir, dan dukungan beasiswa untuk pustakawan.
- C. Bahan paparan dan masukan yang disampaikan narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari RDPU hari ini, dan substansinya akan menjadi rujukan dalam penyusunan rekomendasi Panitia Kerja Peningkatan Literasi dan Tenaga Perpustakaan (PLTP) Komisi X DPR RI kepada Pemerintah.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.45 WIB.

KETUA RAPAT,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

Dr. H. Abdul Fikri Faqih, MM